



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**INFORMASI TAMBAHAN BAGI CALON PELAMAR
PROGRAM PRO-POOR PLANNING AND BUDGETING**

(Ref. Surat Kapusbindiklatren No. 0318/P.01/01/2013)

1. Di bawah ini informasi tambahan yang menjadi persyaratan calon peserta:
 - a. Instansi yang diundang adalah dari Bappeda, TKPKD, SKPD kunci (lebih disukai dari Pendidikan, Kesehatan, Pertanian/Perikanan Sosial-Budaya, Pekerjaan Umum), staff BPS;
 - b. Peserta diharapkan adalah staf yang biasa bekerja di bidang program dan perencanaan serta di bagian data dari masing-masing instansi;
 - c. Diharapkan terdapat 2 perwakilan dari masing-masing instansi;
 - d. Peserta diharapkan bersedia/berkomitmen menjadi pelatih/fasilitator P3B didaerahnya untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran serta berkeinginan kuat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas di tingkat provinsi ke bawah;
 - e. Setiap peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar mengenai computer, terutama Windows, Microsoft Office;
 - f. Setiap peserta diwajibkan membawa satu laptop atau computer dengan spesifikasi RAM; 2 GB, system operasi Windows dan memiliki progam MS Office Standar (Excel dan Access) dan memiliki DVD Rom;
 - g. Peserta membawa data sector dari instansi, terutama data yang berorientasi geografis (data dalam bentuk soft file):
 - Dinas Kesehatan: Profil Kesehatan (terbaru) dan RKA 2011
 - Dinas Pendidikan: Profil Pendidikan (terbaru) dan RKA 2011
 - Dinas Pertanian: Data Pertanian (terbaru) dan RKA 2011
 - Bappeda: APBD 2011, RKA 2011, data penduduk miskin dan PPLS 2011
 - h. Peserta BPS Provinsi dapat membawa data statistik dasar provinsi masing-masing diharapkan *time series* hingga 5 tahun ke belakang, mengerti tentang jabatan fungsional statistik atau lebih baik kalau juga menjabat sebagai penilai untuk jabatan fungsional statistik.
2. Durasi pelaksanaan pelatihan menjadi 14 hari yang semula 7 hari kerja, dalam kurun waktu tentative antara bulan Mei s.d. September 2013.

Kepala Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana

Ir. Yahya Rachmana Hidayat, M.Sc, Ph.D.
19620323 198903 1 003



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Nomor : 0318/P.01/01/2013
Lampiran : 1 Berkas
Hal : **Penawaran Diklat *Pro-Poor Planning and Budgeting (P3B)***

17 Januari 2013

Yth.

1. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

di

Tempat

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pendidikan dan Pelatihan ***Pro-Poor Planning and Budgeting (P3B)***, bersama ini kami informasikan bahwa kami membuka kembali pendaftaran diklat P3B, dengan informasi sebagai berikut:

1. Diklat akan dilaksanakan selama 7 hari sebanyak 5 angkatan, dalam kurun waktu tentative antara bulan Mei s.d. September (kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren).
2. Persyaratan calon peserta adalah :
 - a. PNS yang menangani perencanaan yang terkait dengan permasalahan kemiskinan multidimensi dan penganggaran program/kegiatan dari Provinsi/Kabupaten/Kota, maksimal eselon IV;
 - b. Masakerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - c. Pendidikan minimal S1, dan menguasai *Microsoft Office*;
 - d. Umur setinggi-tingginya 5 tahun sebelum pensiun;
 - e. Peserta berkelompok maksimal 5 orang (1 orang ketua Tim dari Bappeda, dan peserta lainnya dari SKPD/DPRD);
 - f. Peserta membawa data, dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra SKPD, dan data lainnya yang diperlukan);
 - g. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya;
 - h. Mengisi Formulir Pendaftaran dan pernyataan kesediaan *cost-sharing* terlampir.
3. Materi diklat dan rincian informasi lainnya dapat dilihat pada lampiran.

Jika diklat P3B yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Saudara, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami **paling lambat tanggal 28 Maret 2013**, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf kami Sdr. Wiky Witarni/Karyoto/Mulyani Rachmiati/Ch. Nunik Ispriyanti di No. Telp. (021) 31931447.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana



Ir. Yahya Rachmana Hidayat, M.Sc., Ph.D.
19620323 198903 1 003

Tembusan :

1. Bapak Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan);
2. PPK Dukungan Manajemen IV Sesmeneg PPN/Settama Bappenas.

**PUSBINDIKLATREN BAPPENAS
FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR
DALAM NEGERI**

1. Nama (sesuai ijazah terakhir):..... NIP:
2. Tempat/tanggal lahir : Jenis Kelamin (L/ P).....
3. Alamat rumah :
Kab/Kota/Prov Kode Pos
Telpon/Fax/HP (.....)
4. e-mail address :
5. Nama instansi asal :
6. Nama Unit Kerja :
7. Alamat Unit Kerja :
Kab/Kota/Prov..... Kode Pos
Telpon/Fax/HP (.....)
8. Jabatan sekarang : Gol :
9. TMT PNS 100%, pada Gol. III/a :/...../..... Masa kerja:
10. Pendidikan Terakhir : S1 / S2 / S3 PT :
Fakultas (S1/S2/S3) : Jurusan:
Lulus tahun (S1/S2/S3) : IPK: skala:
11. Apakah sedang mengikuti /dalam proses pelamaran program diklat Pusbindiklatren? : Ya/Tidak
12. Pilihan diklat yang akan diikuti :
.....
.....
13. Uraikan secara singkat tugas pekerjaan Saudara sehari-hari saat ini :
.....
.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren.

Menyetujui,
Pejabat Eselon II :..... tgl 20

Yang bersangkutan,

ttd
(.....)
Nama Jelas

ttd
(.....)
Nama Jelas

KOP INSTANSI
(Surat Kesiediaan *Cost-Sharing*)

(tempat/tgl/bln/thn)

Nomor :
Lamp. :(berkas)
Hal : Kesiediaan Pembiayaan Diklat
a.n. 1. Sdr. X
2. Sdr. Y
3. Sdr. Z

Yth. Sdr. Kapusbindiklatren Bappenas
Di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kapusbindiklatren Bappenas, nomor/...../2013, tentang ketentuan pembiayaan *cost sharing* untuk program non gelar dalam negeri yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Item Mandatory	(dalam Rp)	Item Voluntary	(dalam Rp)	(Total Rp)
1	X					
2	Y					
3	Z					

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....,

(.....)
NIP:

Tembusan :

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....;
2. Penyelenggara Diklat;
3. Sesmen PPN/Sestama Bappenas;
4. Peserta diklat yang bersangkutan.

Catatan:

Mandatory : adalah porsi pendanaan yang menjadi **kewajiban** instansi asal berupa:

- a. Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi;
- b. Uang saku.

Voluntary : adalah porsi pendanaan yang secara **sukarela** ditanggung oleh instansi asal.

KURIKULUM DIKLAT
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT MISKIN
(*PRO-POOR PLANING AND BUDGETING*)

I. LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih besarnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2007, tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebesar 16,58 persen. Sejalan dengan strategi kebijakan pro-poor, berbagai kebijakan dan program telah dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut. Anggaran pemerintah juga terus ditingkatkan untuk mengatasi kemiskinan. Namun demikian, dalam era desentralisasi ini, efektivitas langkah penurunan kemiskinan ini sangat tergantung juga pada pelaksanaannya di daerah. Bagaimana penterjemahan kebijakan nasional tersebut di daerah, bagaimana anggaran pembangunan tersebut digunakan di daerah, dan apakah hal-hal tersebut tercermin pada dokumen rencana pembangunan dan teraktualisasikan pada penggunaan anggaran pembangunan, masih perlu kita cermati bersama.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka diperlukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan DPRD untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap rencana yang bersifat *pro-poor dan* bagaimana menuangkannya ke dalam rencana kerja pemerintah di daerah, serta menggunakannya untuk mengarahkan penggunaan anggaran pembangunan yang lebih berpihak dan memberi perhatian lebih pada masyarakat miskin.

Dengan latar belakang tersebut diatas, maka perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (Diklat P2BMM)

II. TUJUAN UMUM PELATIHAN

Meningkatkan kompetensi aparatur perencana daerah dalam bidang penyusunan perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada rakyat miskin.

III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN

Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini dinataranya adalah:

- Agar peseeta mengerti dan memahami konsep dasar, metodologi, dan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada rakyat miskin.
- Agar peserta mampu memanfaatkan instrumen-instrumen *Pro-Poor Planing and Budgeting* (P3B) untuk memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota/propinsi sehingga dapat lebih menjawab permasalahan kemiskinan.

- Agar peserta dapat menyusun rencana tindak untuk penerapan instrumen P3B dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah masing-masing.

IV. KELUARAN (*OUTPUT*) PELATIHAN

Keluaran (*Output*) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (*ProPoor Planing and Budgeting*) ini adalah peserta terlatih dan mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kemiskinan.

V. KRITERIA PENENTUAN PESERTA

- Pendidikan minimal S1.
- Memahami dan biasa menggunakan *Microsof Office*.
- Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Umur maksimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki masa pension.
- Perencana atau pegawai negeri sipil (PNS) yang menangani perencanaan yang terkait dengan permasalahan kemiskinan multidimensi dan penganggaran program/kegiatan dari Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas dan DPRD).
- Berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah).

VI. PELAKSANAAN PELATIHAN

Pelaksana diklat Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin (*ProPoor Planing and Budgeting*) adalah Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Pendidikan di bawah Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki Kerjasama dengan Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) yang memiliki kompetensi sesuai topik pelatihan dan telah memperoleh Akreditasi sebagai pelaksana diklat yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren.

VII. KRITERIA PENGAJAR

- Calon Pengajar harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang materi yang akan diajarkan.
- Mengikuti Satuan Acara Pembelajaran yang sudah ditetapkan.
- Minimal memiliki latar belakang pendidikan jenjang Master (S2).
- Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun.
- Pengajar pernah mengikuti Trainig of Trainer (TOT) diklat P3B.

- Pengajar dari Bappenas akan diprioritaskan bagi pejabat Eselon I, II dan III serta Pejabat Fungsional Perencana (FPF) yang kompeten dibidang yang akan diajarkan.
- Pengajar dari universitas ditentukan oleh pihak pelaksana diklat dengan mengacu pada kompetensi calon pengajar terhadap materi yang akan diajarkan.

VIII.METODE PELATIHAN

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok, praktek kerja dan presentasi, dengan perbandingan 20% teori dan 80% praktek.

VIII. KURIKULUM

1. *Pro-Poor Planing and Budgeting*/Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (P3B/P3BM) sebagai salah satu pendekatan dalam melakukan percepatan pengurangan kemiskinan.
 - a. Kemiskinan dan Akar Permasalahan.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Pro-Poor Planing Budgeting.
 - c. Monitoring –Evaluating (P3BM).
2. Analisa Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
 - a. Analisis target dan indikator kinerja RPJMD dan RKPD.
 - b. Analisis Renja SKPD.
 - c. Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran.
3. Pemahaman terhadap Indikator MDGs.
 - a. Ketersediaan dan kualitas indikator MDG di daerah, serta strategi pengumpulannya.
4. Pengoperasian Sistem Database MDGs.
 - a. Pengenalan sistem database MDGs dan instalasinya.
 - b. Pengisian dan pengelolaan data MDGs kabupaten.
 - c. Pengoperasionalan database MDGs (pengenalan menu dan pemanfaatannya).
5. Penilaian Kinerja Pembangunan dengan Menggunakan MDGs Scorecard/SPM Scorecard.
 - a. Pengantar MDGs scorecard/SPM Scorecard.
 - b. Menyusun scorecard secara manual.
 - c. Menyusun scorecard menggunakan scorecard creator.
6. Penyusunan Peta Tematik berdasarkan data yang tersedia.
 - a. Pengantar tentang GIS, GIS software dan instalasinya.
 - b. Menyusun peta administrasi kabupaten.

- c. Pemetaan tematik dengan satu indikator.
 - d. Pemetaan tematik dengan dua indikator.
 - e. Editing peta dasar.
7. Pengoperasian Database Pembangunan
 - a. Pengenalan sistem database program pembangunan (mengisi data, mengelola data, dan membuat report).
 - b. Praktek sistem database program dan latihan dengan data APBD.
 8. Analisis APBD dengan Mmenggunakan Pivot Table.
 - a. Filosofi penganggaran
 - b. Menyusun master table
 - c. Analisa APBD.
 - d. Penyajian hasil analisis APBD dalam bentuk peta, disandingkan dengan peta permasalahannya.
 9. Penentuan Daerah/Lokasi Program/kegiatan dengan Menggunakan Chart Priority.
 - a. Penentuan prioritas (Chart Priority).
 - b. Kecamatan sasaran program/kegiatan berdasar 3 (tiga) indikator yang saling terkait.
 - c. Latihan menentukan prioritas dengan database.
 10. Review Penguasaan Alat Analisis P3BM.
 - a. Penyiapan materi presentasi alat analisa P3BM (kelompok).
 - b. Presentasi alat analisa P3BM (kelompok).
 11. Penyusunan Rancangan Tindak Lanjut (RTL).

IX. KEHADIRAN PESERTA

Tingkat kehadiran peserta dalam diklat Pro-Poor Planing and Budgeting ini adalah minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta dinyatakan tidak lulus.

X. LAMA PELATIHAN

- a. Lama pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin (*ProPoor Planing and Budgeting*) adalah 1 minggu atau 7 hari, dengan hari efektif selama 5 hari kerja.
- b. 1 (satu) sesi = 2 jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 menit.

XI. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing tipe III, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: Biaya pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport local (penjemputan dari penginapan ke tempat diklat).

2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport (tiket PP) dari/ke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama pelatihan.

XII. METODE EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya 1 minggu setelah selesai pelatihan. Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan.

XIII. PROSES PELAMARAN

Pengiriman nama calon peserta diklat *Pro Poor Planning dan Budgeting*, mohon melampirkan formulir pendaftaran yang bertandatangan asli. Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung disampaikan langsung/via pos ke Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Sunda Kelapa No. 9, Jakarta Pusat (10310).

Untuk keterangan lebih lanjut dalam pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui email: pusbindiklatren@bappenas.go.id atau membuka situs: www.Pusbindiklatren.bappenas.go.id.